



DAMPAK KENAIKAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP APBN

Muhammad Insan Firdaus* & Venti Eka Satya**

Abstrak

Konflik geopolitik antara Iran dan Israel telah menciptakan ketidakpastian di pasar minyak global, yang berpotensi memicu lonjakan harga secara signifikan. Lonjakan harga minyak menjadi tantangan karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor energi. Artikel ini membahas dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN dan upaya mitigasinya. Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia yang dapat mempersempit ruang fiskal melalui peningkatan subsidi energi dan tekanan inflasi. Saat ini harga minyak dunia masih berada di bawah asumsi dasar makro yang dipatok dalam APBN 2025, yaitu US\$82/barel. Apabila konflik berkepanjangan, harga minyak dunia berpotensi di atas asumsi dasar. Hal ini akan membebani APBN dan memperlebar defisit anggaran. Pemerintah perlu melakukan upaya mitigasi dengan menyiapkan skenario revisi anggaran subsidi energi, penguatan ketahanan energi, serta memantau perkembangan global secara ketat. Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif agar harga minyak mentah Indonesia tidak melampaui asumsi APBN 2025 yang ditetapkan.

Pendahuluan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki fungsi sebagai instrumen stabilisasi, untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dalam menghadapi berbagai peristiwa yang berdampak serius pada perekonomian nasional, APBN berperan sebagai *shock absorber* yakni menjadi instrumen yang sangat penting untuk memberi dukungan terhadap penanggulangan krisis dan pemulihan ekonomi serta reformasi struktural (Kementerian Keuangan, 2022).

Konflik geopolitik antara Iran dan Israel telah menciptakan ketidakpastian di pasar minyak global, dengan potensi memicu lonjakan harga yang signifikan. Sebagai negara yang bergantung pada impor minyak, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga komoditas energi ini, yang dapat berdampak pada inflasi, defisit neraca perdagangan, dan stabilitas fiskal. Dalam situasi seperti ini, peran APBN sangat penting untuk meredam dampak eksternal terhadap perekonomian domestik. APBN 2025 telah dirancang dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia/*Indonesian crude price* (ICP) sebesar US\$82 per barel, sementara harga minyak dunia saat ini masih berada di kisaran US\$77–US\$73 per barel.

*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: muhammad.firdaus2@dpr.go.id

**) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: venti.satya@dpr.go.id

Namun, jika konflik berkepanjangan atau alur distribusi minyak utama terganggu, harga minyak berpotensi melonjak hingga US\$100–US\$130 per barel. Hal ini dapat mengancam stabilitas makroekonomi Indonesia (“Defisit Anggaran Terancam”, 2025). Artikel ini membahas dampak kenaikan harga minyak terhadap APBN dan upaya mitigasinya.

Dampak Kenaikan Harga Minyak Terhadap APBN

Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberikan dampak besar pada anggaran negara. Konflik geopolitik Iran-Israel mengancam stabilitas harga minyak dunia. Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak menjadi tantangan sendiri karena tingginya ketergantungan terhadap impor energi. Data Badan Pusat Statistik mencatat, sepanjang 2015 hingga 2024, rata-rata volume impor produk minyak bumi Indonesia mencapai 31,10 juta ton per tahun, dengan nilai mencapai US\$19,16 miliar. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor energi, Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia yang dapat membebani APBN dan mempersempit ruang fiskal melalui peningkatan subsidi energi dan tekanan inflasi. Ketergantungan inilah yang membuat lonjakan harga minyak global menjadi beban berat bagi anggaran energi nasional (Putri, 2025).

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengatakan, saat ini harga minyak dunia juga masih berada di bawah asumsi dasar makro yang dipatok dalam APBN 2025, sebesar US\$82 per barel. Adapun harga minyak Brent di akhir pekan ini masih di level US\$77,27 (eop) dan rata-rata ICP atau minyak mentah Indonesia masih ada di bawah US\$73 per barel sehingga masih terdapat ruang fiskal untuk meredam rambatan inflasi (Indraini, 2025). Dengan masih tersedianya ruang fiskal untuk pemberian subsidi dan kompensasi di tengah ketidakpastian global, berarti fungsi APBN sebagai *shock absorber* masih berjalan dengan baik.

M. Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengatakan bahwa setiap kenaikan US\$1 per barel harga minyak, akan menambah beban subsidi energi sekitar Rp10 triliun. Sementara tambahan pendapatan negara dari sektor migas hanya mencapai sekitar Rp3 triliun. Dengan kata lain, secara neto APBN akan terkuras sekitar Rp7 triliun untuk setiap dolar kenaikan (“Defisit Anggaran Terancam”, 2025). APBN Indonesia sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak. Jika harga minyak mencapai US\$100–US\$130/barel, defisit APBN bisa membengkak sampai Rp126–343 triliun. *Threshold* kritis APBN terletak pada kenaikan harga di atas US\$90–100/barel, di mana defisit mulai menggerus ruang fiskal dan memicu tekanan inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa APBN lebih sensitif terhadap kenaikan harga minyak dibandingkan dengan penurunan harga minyak.

Badan Informasi Energi (EIA) AS mencatat, pada tahun 2024, lalu lintas minyak melalui Selat Hormuz rata-rata mencapai 20 juta barel per hari atau sekitar 20% dari konsumsi global. Di sini, kapal tanker hilir-mudik mengangkut gas alam cair (LNG).

Jika Selat Hormuz ditutup, JP Morgan memprediksi harga minyak bisa melonjak hingga US\$130 per barel. Adapun proyeksi Goldman Sachs menyebutkan harga minyak bisa melambung di atas US\$100 per barel (Putra, 2025). Fleksibilitas APBN sebagai *shock absorber* diuji ketika menghadapi skenario terburuk, yaitu ketika Selat Hormuz yang merupakan jalur utama lalu lintas minyak ditutup. Dalam skenario tersebut, defisit APBN dapat melebar signifikan sebesar 2,8%–3% dari PDB, mendekati batas defisit anggaran yang ditetapkan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu sebesar 3% dari PDB. Artinya, APBN 2025 memiliki fleksibilitas moderat, tetapi tidak cukup kuat tanpa langkah-langkah darurat seperti revisi anggaran, penundaan proyek non-prioritas, dan efisiensi belanja.

Upaya Mitigasi Potensi Kenaikan Harga Minyak Dunia

Kenaikan harga minyak berdampak pada pelebaran defisit anggaran karena peningkatan alokasi anggaran subsidi energi untuk menjaga stabilitas harga domestik. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia perlu mengambil sejumlah langkah mitigasi. Pemerintah dapat melakukan revisi anggaran subsidi energi dan memantau perkembangan global secara ketat, dengan membuka impor alternatif guna meredam tekanan harga serta menjaga stabilitas pasokan domestik.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, berpendapat bahwa risiko kenaikan harga BBM di Indonesia harus diwaspadai. Pemerintah diharapkan mampu memitigasi dampak ini, terutama dengan menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dari sisi kebijakan fiskal, Yayan mendorong pemerintah menyesuaikan dan mengalihkan anggaran dari pembiayaan yang kurang produktif untuk memitigasi risiko kenaikan harga minyak. Insentif yang saat ini sudah ada, seperti subsidi listrik dan bantuan bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta, harus diperkuat, terutama untuk kelompok desil 3 sampai 6 yang paling banyak menggunakan BBM dalam aktivitas produktifnya (Putri, 2025).

Pemerintah telah menyiapkan tiga pendekatan mitigasi utama (Mahadewi, 2025). Pertama, mencakup respons kebijakan fiskal melalui penyusunan stimulus yang terarah dan rekonstruksi belanja negara untuk menjaga daya beli masyarakat serta menggerakkan sektor produktif. Langkah kedua melalui koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna menjaga stabilitas makroekonomi dan nilai tukar rupiah. Dukungan terhadap sektor keuangan juga dipersiapkan melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk penguatan cadangan devisa dan stabilisasi mata uang nasional. Strategi ketiga dilakukan dengan memperkuat diversifikasi energi dan ketahanan pangan guna meminimalisasi tekanan dari lonjakan harga komoditas internasional.

Pemerintah menekankan komitmennya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, meski dihadapkan pada tantangan global yang kompleks. Strategi jangka pendek berfokus pada optimalisasi fungsi APBN sebagai *shock absorber* melalui instrumen subsidi yang tepat sasaran, sementara langkah jangka panjang diarahkan pada penguatan ketahanan energi melalui diversifikasi sumber dan percepatan transisi energi terbarukan.

PT Pertamina (Persero) sebagai salah satu BUMN yang bergerak di sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri dan percepatan transisi ke energi berkelanjutan dengan cara menjalankan strategi diversifikasi pemasok dan jalur distribusi impor. Dalam mendukung transisi energi, Pertamina turut mempercepat produksi energi ramah lingkungan seperti biodiesel B40, yang berpotensi mengurangi konsumsi solar hingga 9 juta barel per tahun. Perusahaan ini juga telah mengembangkan *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) dengan kandungan campuran sebesar 2,4% serta bioetanol dengan kadar 5% sebagai bukti konkret komitmennya terhadap energi hijau. Melalui kerja sama antar-pemerintah, Pertamina berupaya menjaga kesinambungan pasokan energi di tengah ketidakpastian global (“Pertamina Jalankan Strategi”, 2025).

Penutup

Konflik Iran-Israel telah menciptakan ketidakpastian harga minyak global dan berpotensi memicu lonjakan harga yang signifikan. Bagi Indonesia, lonjakan harga minyak menjadi tantangan sendiri karena tingginya ketergantungan terhadap impor energi. Saat ini harga minyak dunia masih di bawah asumsi dasar makro dalam APBN 2025, sebesar US\$82 per barel, sehingga masih memberikan ruang fiskal untuk subsidi dan kompensasi. Apabila konflik berkepanjangan, risiko defisit APBN akan semakin tinggi karena peningkatan subsidi energi dan tekanan inflasi. Pemerintah dapat melakukan upaya mitigasi dengan menyiapkan skenario revisi anggaran subsidi energi, penguatan ketahanan energi, serta memantau perkembangan global secara ketat,

Komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipatif agar ICP tidak melampaui asumsi APBN 2025 yang ditetapkan sebesar US\$82 per barel. Selama harga minyak dunia masih terkendali, pemerintah belum perlu mengambil pembiayaan baru. Namun, jika harga minyak dunia melonjak signifikan, pemerintah harus menambah anggaran subsidi energi untuk menjaga kestabilan harga ICP.

Referensi

- Defisit anggaran terancam melebar akibat lonjakan harga minyak dunia. (2024, Juni 24). *Kontan.co.id*. <https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-anggaran-terancam-melebar-akibat-lonjakan-harga-minyak-dunia>
- Indraini, Anisa. (2025, Juni 23). Kemenkeu waspadai dampak kenaikan harga minyak ke APBN. *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/energi/d-7978644/kemenkeu-waspada-dampak-kenaikan-harga-minyak-ke-apbn>
- Kementerian Keuangan. (2022). APBN terus menjalankan fungsi shock absorber. *Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulsel/id/data-publikasi/berita-terbaru/2873-apbn-terus-menjalankan-fungsi-shock-absorber.html>
- Mahadewi, M. P. (2025, Juni 20). Begini cara pemerintah atasi dampak perang Israel-Iran. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/begini-cara-pemerintah-atasi-dampak-perang-israel-iran-1755648>
- Pertamina jalankan strategi adaptif menghadapi fluktuasi ekonomi demi suksesnya transisi energi. (2025, Juni 2). *Makassar.teropongbisnis.id*. <https://makassar.teropongbisnis.id/detail/474315/pertamina-jalankan-strategi-adaptif-menghadapi-fluktuasi-ekonomi-demi-suksesnya-transisi-energi>
- Putra, H. R. (2025, Juni 25). Jika imbas perang Iran-Israel terlambat dimitigasi. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/imbis-perang-iran-israel-1795497>
- Putri, R. S. (2025, Juni 17). Mitigasi menghadapi efek perang Iran-Israel. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/imbis-perang-iran-israel-1716845>

